

# MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NELAYAN DI KABUPATEN DEMAK (Studi Kasus di Desa Morodemak)

**Tri Risandewi**

*Balitbang Provinsi Jawa Tengah*

**Email: reesha83@yahoo.com**

## ABSTRACT

*The aims of this research are describing the fisherwomen empowerment model and the supporting factors and the obstacles of the fisherwomen empowerment model in Morodemak Village-Demak Regency. From the research can be concluded that the fisherwomen in Puspita Bahari Morodemak village is the model of exploring business which is the final step of fisherwomen empowering through integrated and effective technology implementation. The factors which enhance those models are the supports not only from the government but also from the private institution and the society.*

*There are some factors which slowen down them, the obstacle of having organization (materialistic and cultural obstacles, cultural patriarcy, and cultural inferiority). Moreover the obstacles also can be found in the management (such as limited infrastructure machines, slicer, stoves, freezer and included the kitchen utensils and there is no production place), products distribution, and the unreachable price of the raw material for the production and the unpredictable fish whish is caught by the fishermen can be the most dangerous factors. In order to overcome those obstacles, there must be ways to help the fisherwomen in organization, improving their knowledge through training. The training can improve their knowledge in pre- production and post production in order to improve the quality of the products and can be accepted by many customers. Moreover, the group of the fisherswomen needs to be given more capital, infrastructure, to run the business.*

**Keywords:** *fisherwomen, fisherwomen model empowerment, the supporting factors and the obstacles of the fisherwomen model empowerment*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan memiliki potensi kelautan yang cukup besar, seharusnya mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup pada potensi kelautan (maritim) tersebut. Pada kenyataannya, kehidupan masyarakat nelayan senantiasa dilanda kemiskinan bahkan kehidupan nelayan sering diidentikkan dengan kemiskinan (Nasution et al., 2005). Menurut Dahuri (2001) yang diacu Nasution et al. (2007), tingkat

kesejahteraan para pelaku perikanan (nelayan) pada saat ini masih dibawah sektor-sektor lain termasuk pertanian agraris. Nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lain di sektor pertanian. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor kompleks yang saling terkait serta merupakan sumber utama yang melemahkan kemampuan masyarakat dalam membangun wilayah dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya,

oleh karena itu kemiskinan merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan kawasan pesisir (Kusnadi et, al., 2007).

Permasalahan yang sering dijumpai dalam masyarakat nelayan miskin adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Sumber daya perikanan di Indonesia merupakan sumber daya yang besar. Akan tetapi, rendahnya kualitas SDM nelayan tentunya dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat nelayan. Permasalahan tersebut tentunya perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan yang ada. Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dapat mempengaruhi angka kemiskinan yang akan menurun dimana besarnya angka kemiskinan masyarakat nelayan menyumbang angka yang cukup besar. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo (Kompas, 13 September 2013), tingkat kemiskinan di wilayah pesisir mencapai 7,87 juta atau 25,14% dari jumlah penduduk miskin nasional. Besarnya angka kemiskinan dalam masyarakat nelayan di Indonesia tentunya tidak sebanding dengan ketersediaan sumberdaya perikanan yang ada. Sumber daya perikanan merupakan yang terbesar di dunia, tetapi kemampuan produksi, pengolahan, peningkatan nilai tambah dan daya saing rendah (Kamiso, 2012).

Kemiskinan dan kesulitan-kesulitan hidup merupakan siklus peristiwa sosial ekonomi yang selalu berulang setiap tahunnya dalam rumah tangga nelayan. Menurut Kusnadi (2003), berdasarkan perspektif antropologis, masyarakat nelayan memiliki pola-pola kebudayaan yang berbeda dari masyarakat lainnya sebagai hasil dari interaksi mereka dengan lingkungan beserta sumber daya yang ada di dalamnya. Pola-pola tersebut menjadi kerangka berpikir mereka dalam menghadapi kehidupan sehari-

hari. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi (2001a), mobilitas vertikal nelayan dapat terjadi oleh dukungan para istri mereka yang memiliki kecakapan berdagang. Keberadaan dan kedudukan istri tersebut tentunya dapat menjadi katalis peningkatan kesejahteraan rumah tangga nelayan. Akan tetapi, peranan perempuan keluarga nelayan belum optimal dalam membantu peningkatan ekonomi keluarganya, terutama berkaitan dengan proses pengelolaan hasil pasca tangkap. Pengetahuan dan keterampilan mereka masih terbatas dan belum pernah memperoleh inovasi teknologi. Selain itu mereka juga belum memiliki kemampuan dalam pengembangan usaha, sehingga semua itu menyebabkan kehidupan mereka yang masih marjinal dan miskin (Widodo et. al, 2011).

Provinsi Jawa Tengah terdapat 17 kabupaten dan kota yang terletak di pesisir dengan jumlah penduduk sebanyak 7.071.785 orang atau 900.528 Kepala Keluarga pada tahun 2010 (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng, 2011). Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng tahun 2012, jumlah nelayan yang ada di Provinsi Jawa Tengah mencapai 103.441 orang pada tahun 2011. Jumlah tersebut meningkat 4,30% jika dibandingkan dengan jumlah nelayan pada tahun 2007. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Provinsi Jawa Tengah mampu mengekspor hasil perikanan sebesar 21.025 ton senilai Rp 95 milyar pada tahun 2010. Hasil produksi perikanan yang ada di Jawa Tengah berasal dari perikanan tangkap dan budidaya baik di laut, tambak, kolam, karamba, maupun sawah. Selain mempunyai potensi yang besar dalam perikanan, Jawa Tengah juga mempunyai potensi yang besar dalam bidang kelautan. Provinsi Jawa Tengah

mempunyai luas pesisir sebesar 122.793,79 hektar.

Kabupaten Demak sebagai salah satu daerah pesisir yang terletak di sekitar Pantai Utara Jawa Tengah, memiliki potensi sumberdaya pesisir yang sangat melimpah salah satunya adalah sumberdaya perikanan laut. Produksi ikan laut di Kabupaten Demak mencapai 1.306.508 kg senilai Rp 3.744.239.000 pada tahun 2011 yang mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2010 yang mencapai 1.476.646 kg dengan nilai

produksi Rp 6.124.745.000. Kabupaten Demak dengan garis pantai sepanjang 34,71 kilometer menyebar di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, dan Wedung. Sebagian besar mata pencaharian utama penduduk wilayah pesisir Kabupaten Demak adalah nelayan. Tabel berikut ini akan menjelaskan jumlah nelayan yang ada di 4 kecamatan tersebut berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Demak.

Tabel 1.1 Jumlah Nelayan di Kabupaten Demak Tahun 2011

No.	Kecamatan	Nelayan Laut	
		Juragan	Pendega
1.	Sayung	528	1.078
2.	Karangtengah	95	240
3.	Bonang	1.251	5.765
4.	Wedung	1.601	3.761
	<b>Jumlah</b>	<b>3.475</b>	<b>10.844</b>

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Demak, 2012

Ada 2 jenis nelayan laut yang ada di Kabupaten Demak yaitu juragan (pemilik modal, kapal, teknologi) dan pendega (buruh nelayan). Nelayan buruh (pendega) merupakan nelayan yang tidak memiliki alat-alat produksi dalam kegiatan perikanan seperti alat tangkap, perahu, dan lain-lain. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah nelayan laut di Kabupaten Demak pada tahun 2011 sebanyak 14.319 orang yang terdiri dari pendega sebanyak 10.844 orang dan juragan sebanyak 3.475 orang. Terlihat bahwa jumlah pendega/buruh nelayan lebih besar dibandingkan dengan juragan karena membutuhkan modal yang besar untuk dapat melaut. Sebagian besar juragan (40%) berada di Kecamatan

Wedung, sedangkan hampir separuh pendega berada di Kecamatan Bonang. Selain nelayan, ada juga beberapa kelompok pengolah ikan yang ada di Kecamatan Wedung, Dempet, Bonang, dan Bulusan. Mereka mengolah hasil tangkapan laut maupun tambak menjadi beberapa jenis produk olahan yaitu terasi, kerupuk ikan dan udang, dendeng, ikan asin, ikan asap, terasi bubuk, tepung ikan, dan bandeng presto yang dipasarkan di daerah sekitar Demak, Semarang, dan Kudus. Selain itu juga dijual di pameran-pameran yang diadakan oleh dinas-dinas Pemerintah Kab. Demak, minimarket hasil perikanan, dan kantor-kantor pemerintah dan toko-toko.

Tabel 1.2 Kelompok Pengolah Ikan di Kabupaten Demak Tahun 2010

No.	Nama Kelompok	Kecamatan	Jenis Usaha
1.	Lobster Jaya	Wedung	Terasi, Kerupuk Ikan dan udang
2.	PKBM Al-Mutaqin	Wedung	Dendeng, Ikan Asin, Terasi Bubuk
3.	P2MBG	Dempet	Krupuk Ikan Lele
4.	Asap Indah	Bonang	Ikan Asap
5.	Dahlia	Wedung	Kerupuk Ikan
6.	Bunga Tulip	Wedung	Terasi
7.	Puspita Bahari	Bonang	Aneka Olahan Ikan
8.	Sinar Sejahtera	Bonang	Kerupuk Ikan
9.	Wanita Mandiri	Bonang	Ikan Asin
10.	Karya Mina Usaha	Bonang	Terasi, Tepung Ikan
11.	Miroso	Bulusan	Bandeng Presto

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, 2013

Berdasarkan tabel tersebut diatas, sebagian besar kelompok pengolah hasil perikanan ada di Kecamatan Bonang yaitu 5 kelompok (Asap Indah, Puspita Bahari, Sinar Sejahtera, Wanita Mandiri, dan Karya Mina Usaha). Kehidupan masyarakat nelayan umumnya tidak memiliki usaha lain di luar penangkapan ataupun pengolahan ikan. Nelayan banyak menganggur di saat musim paceklik ikan akibat cuaca yang tidak bersahabat. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab produktivitas nelayan yang dapat dikatakan sangat rendah karena nelayan tidak dapat melaut sepanjang tahun. Untuk mendukung perekonomian keluarga, istri-istri nelayan harus berusaha mencari sumber pendapatan lain. Salah satunya adalah dengan mengolah hasil-hasil tangkapan ikan suami mereka. Dengan jumlah nelayan pandega yang paling banyak dibandingkan dengan kecamatan lain, maka muncul banyak kelompok pengolah ikan di Kecamatan Bonang. Kelompok Puspita Bahari merupakan salah satu kelompok perempuan nelayan yang sudah mendapatkan beberapa penghargaan baik dari pemerintah maupun swasta. Misalnya penghargaan Wanita Inspiratif

dari Kick Andy (Metro TV) dan 100 wanita hebat dari Asean Coral Woman dan termasuk dalam anggota Persatuan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI). Untuk dapat mengetahui secara mendalam mengenai model pemberdayaan perempuan nelayan yang ada dalam kelompok tersebut perlu adanya penelitian tentang bentuk pemberdayaan perempuan nelayan di Desa Morodemak terutama di Kelompok Puspita Bahari.

## B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana bentuk model pemberdayaan perempuan nelayan pada kelompok Puspita Bahari di Desa Morodemak Kabupaten Demak?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong dan menghambat model pemberdayaan perempuan nelayan pada kelompok Puspita Bahari di Desa Morodemak Kabupaten Demak?

### **C. Tujuan**

1. Mendeskripsikan model pemberdayaan perempuan nelayan yang ada di Desa Morodemak.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat model pemberdayaan perempuan nelayan di Desa Morodemak Kabupaten Demak

### **D. Manfaat**

1. Bagi kabupaten/kota hasil penelitian merupakan rekomendasi/ masukan bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan pemberdayaan kelompok perempuan nelayan ;
2. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah hasil penelitian merupakan rekomendasi kebijakan bagi pengambil keputusan di kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam mengoptimalkan pemberdayaan perempuan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kerangka Teori**

#### **1. Konsep Pemberdayaan**

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, jaringan kerja, partisipasi, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Menurut Hikmat (2006), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. Sedangkan menurut McArdle (1989), pemberdayaan adalah proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai

tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih dibudidayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka meencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan/kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom) dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan, kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2005).

Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa “Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya yang berarti kekuatan atau kemampuan”. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Sementara menurut Prijono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W (1996:55), pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, menurut Nursahbani

Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional (Riant Nugroho, 2008) mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan yaitu:

- a) Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan.
- b) Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan aset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
- c) Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
- d) Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.

## 2. Masyarakat Pesisir

Menurut Victor PH Nikijuluw (Direktur Pemberdayaan Masyarakat Departemen Kelautan dan Perikanan), masyarakat pesisir adalah kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir yang terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, dan *supplier* faktor sarana produksi perikanan.

## 3. Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan

Melaksanakan suatu pembangunan yang berperspektif gender adalah suatu komitmen untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan dengan merasa peduli terhadap kemampuan (environment) baik perempuan maupun laki-laki. Pengembangan kemampuan perempuan dan laki-laki perlu karena dalam berbagai kebijakan/program yang ditujukan pada

anggota masyarakat seringkali terjadi bahwa kebutuhan perempuan kurang diperhatikan dalam mengisi peran multidimensionalnya kecuali perannya dalam keluarga. Sedangkan laki-laki sebagai kepala keluarga kerap kali juga tidak diperhitungkan untuk peran pentingnya sebagai suami dan ayah (Sadli, 1988).

Pembinaan peran wanita sebagai mitra sejajar pria ditujukan untuk peningkatan peran aktif dalam kegiatan pembangunan baik di perkotaan maupun di pedesaan terutama dalam menangani masalah sosial dan ekonomi yang diarahkan pada pemerataan hasil pembangunan, pengentasan kemiskinan, pemeliharaan lingkungan dan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia. Moose (1996) dengan menggunakan konsep Maxim Moly mengemukakan bahwa pendekatan pembangunan dalam hubungannya dengan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yaitu:

- a) Pendekatan kesejahteraan (Welfare Approach) yang didasarkan 3 asumsi yaitu perempuan sebagai penerima pasif pembangunan, peran keibuan yang merupakan peranan yang paling penting bagi perempuan di dalam masyarakat, dan mengasuh anak yang merupakan peranan perempuan paling efektif dalam seluruh aspek pembangunan ekonomi;
- b) Pendekatan kesamaan (Equity Approach) bahwa perempuan merupakan partisipan aktif dalam proses pembangunan yang mempunyai sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kerja produktif dan reproduktif mereka walaupun sumberdaya tersebut seringkali tidak diakui;
- c) Pendekatan anti kemiskinan (Anti-Poverty Approach) menekankan pada upaya menurunkan ketimpangan

pendapatan antara perempuan dan laki-laki dengan sarasannya adalah pekerja miskin. Pendekatan anti kemiskinan untuk perempuan menitikberatkan pada peranan produktif mereka atas dasar bahwa penghapusan kemiskinan dan peningkatan keseimbangan pertumbuhan ekonomi membutuhkan peningkatan produktivitas perempuan pada rumah tangga yang berpendapatan rendah;

- d) Pendekatan *efficiency*, penekanan perempuan bergeser ke pembangunan dengan asumsi bahwa peningkatan partisipasi ekonomi perempuan di negara dunia ketiga secara otomatis berkaitan dengan peningkatan kesamaan sehingga meningkatkan kerja perempuan disektor informal;
- e) Pendekatan pemberdayaan, berpusat pada upaya penghapusan subordinasi perempuan. Adanya kesamaan hak ekonomi (peluang untuk menguasai sumberdaya produktif, persamaan upah untuk kerja yang sama, perlindungan hukum ketenagakerjaan)

#### 4. Perempuan Nelayan

Perempuan nelayan adalah suatu istilah untuk wanita yang hidup di lingkungan keluarga nelayan, baik sebagai istri maupun anak dari nelayan pria. Kaum wanita di keluarga nelayan umumnya terlibat dalam aktivitas mencari nafkah untuk keluarganya. Selama ini wanita nelayan bekerja menjadi pengumpul kerang-kerangan, pengolah hasil ikan, pembersih perahu yang baru mendarat, pengumpul nener, membuat/memperbaiki jaring, pedagang ikan dan membuka warung. Namun peran wanita di lingkungan nelayan ini belum dianggap berarti, sebagai penghasil pendapatan keluarga pun dianggap *income* tambahan. Selain itu wanita nelayan juga menanggung resiko tinggi akibat tingginya

kecelakaan kerja di usaha penangkapan ikan laut ini (Indrawadi, 2013).

Pengalaman menunjukkan bahwa pemberdayaan wanita nelayan dalam pembangunan kelautan dan perikanan sulit dikembangkan, hal ini disebabkan karena kurangnya IPTEK dan kemiskinan yang selalu mengukung mereka. Beberapa masalah dalam integrasi wanita nelayan dalam pembangunan kelautan dan perikanan antara lain, keadaan pendidikan yang umumnya sangat rendah, tenaga wanita sering tidak dihargai, masih adanya nilai-nilai sosial budaya masyarakat sebagai penghambat berperan sertanya wanita nelayan secara aktif, sedangkan beban kerja wanita dalam keluarga cukup tinggi.

#### 5. Model Pemberdayaan Perempuan Nelayan di Kawasan Pesisir

Menurut Widodo *et. al* (2011), model pemberdayaan perempuan nelayan di kawasan pesisir dapat dikembangkan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu pengembangan kelompok (*community development*), pra-pengembangan usaha (*pre-business development*), dan pengembangan usaha (*business development*).

Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut dikemukakan bahwa tahap-tahap pemberdayaan perempuan nelayan di kawasan pesisir antara lain :

##### a. Pengembangan Kelompok (*Community Development*)

Tahap ini merupakan implementasi program pemberdayaan yang perlu melakukan identifikasi potensi yang ada di wilayah sasaran terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan supaya sasaran program terdeskripsi akan keahlian-keahliannya sehingga partisipasi dan motivasi masyarakat untuk mengikuti program-program lain di masa mendatang meningkat. Kemudian, para perempuan nelayan ini harus diakomodir dalam satu wadah yang disebut sebagai kelompok

perempuan sasaran program untuk memudahkan dalam pemberdayaan dan pengembangan.

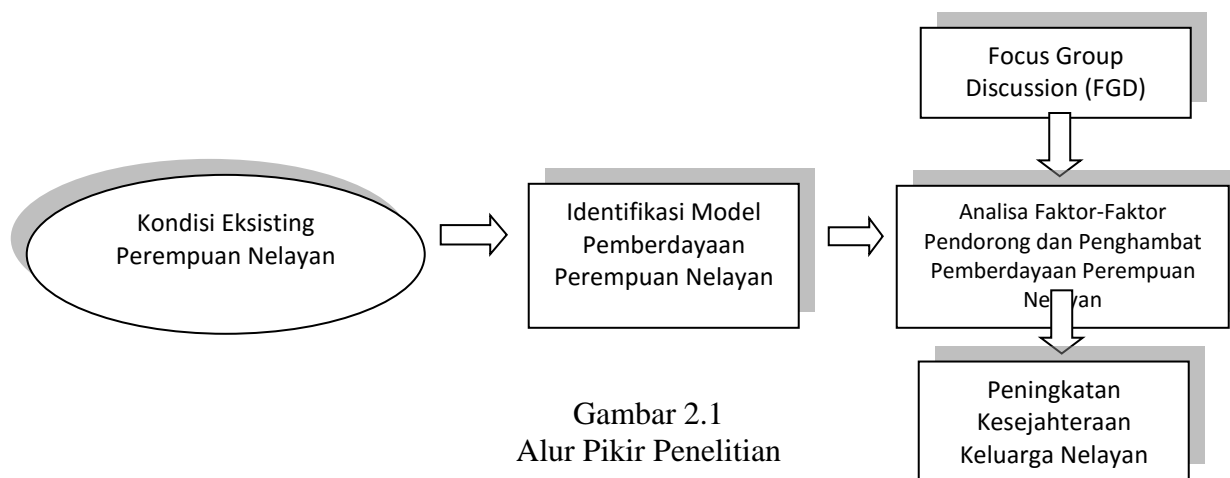
b. Pra Pengembangan Usaha (Pre-Business Development)

Pada tahap ini, kelompok perempuan nelayan disiapkan untuk pengembangan usaha yang lebih besar, sehingga mampu mengakselerasi peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga nelayan. Akan tetapi, pada tahap ini program pemberdayaan belum berorientasi pada pasar dan keuntungan. Oleh karena itu memerlukan pendampingan dan pembinaan sehingga pada saat tahap pengembangan usaha, para kelompok perempuan nelayan tidak lagi dihadapkan pada masalah pasar, modal, dan faktor-faktor penghambat lainnya.

c. Pengembangan Usaha (Business Development)

Tahap ini merupakan tahap akhir dari model pemberdayaan masyarakat perempuan nelayan melalui penerapan teknologi tepat guna dan terpadu untuk pengolahan ikan pasca tangkap. Tahap ini dilakukan melalui pengembangan usaha kelompok perempuan nelayan dimana program pemberdayaan telah berorientasi pada pasar dan keuntungan. Hal ini disebabkan muara akhir dari kegiatan pengembangan usaha kelompok adalah *incoming generating* bagi anggota-anggotanya, maka kelompok usaha nelayan harus bersifat dinamis. Kelompok perempuan nelayan disiapkan untuk dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman usaha kelompok, terutama yang bersumber dari lingkungan eksternal.

**B. Kerangka Pemikiran**



Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian

**METODE PENELITIAN**

**A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menurut Whitney dalam Natsir (1988) adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk mendapatkan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antar

fenomena yang diselidiki. Dengan sifat tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tertentu secara cermat dan analitis, serta membuat analisis secara sistematis, aktual dan akurasi mengenai model pemberdayaan perempuan nelayan yang ada di Desa Morodemak Kabupaten Demak.



## **B. Fokus dan Lokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat model pemberdayaan perempuan nelayan di lokasi penelitian

### **2. Lokus Penelitian**

Lokus dalam penelitian ini adalah kawasan pesisir Pantai Utara Jawa Tengah yaitu di Kabupaten Demak. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Pertimbangan utama pemilihan lokasi penelitian adalah daerah atau kabupaten yang sebagian besar perempuan berada di daerah pesisir dan memiliki kelompok perempuan nelayan yang sudah maju dan berkembang.

## **C. Lingkup/Populasi dan Responden**

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah stakeholder yang menangani pemberdayaan masyarakat terutama perempuan yang berada di pesisir di Kabupaten Demak. Sampel ditetapkan 25 responden, yaitu responden untuk masing-masing kabupaten yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah (bidang pemberdayaan perempuan nelayan) sebanyak 5 responden dan anggota kelompok perempuan nelayan sebanyak 20 responden dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk responden aparatur pemerintah daerah dan *Accidental Sampling* untuk responden masyarakat yang terdiri dari anggota kelompok perempuan nelayan (Kelompok Puspita Bahari) di Desa Morodemak Kecamatan Bonang.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi pengamatan langsung atau observasi dan *Focus Group Discussion* (FGD), serta studi pustaka dan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan model pemberdayaan perempuan nelayan. Masing-masing metode

digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berbeda. Populasi digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu deskripsi model pemberdayaan perempuan nelayan. Rumusan masalah kedua yaitu mengetahui faktor pendorong dan penghambat model pemberdayaan perempuan nelayan dilakukan dengan metode sampel yang terdiri dari sampel bertujuan. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan menggunakan metode observasi. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh dari responden. Adapun data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait, penelitian-penelitian dan buku-buku, serta informasi yang relevan.

Data primer, yaitu data utama yang diambil dan diperoleh secara langsung melalui pengamatan (*observasi*) terhadap fenomena atau obyek yang diteliti langsung di lapangan dan wawancara (*interview*) dengan para narasumber atau informan (Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta tokoh/anggota kelompok perempuan nelayan). Sesuai dengan latar belakang dan tujuan yang akan dicapai, teknik pengambilan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan metode *observasi*, yaitu penelitian yang memanfaatkan informasi dan data primer yang diperoleh secara langsung dari subyek yang diteliti melalui FGD dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dalam kuesioner. Data primer diperoleh dengan metode:

- 1) *Observasi* menggunakan kuesioner terhadap pelaku meliputi deskripsi model pemberdayaan perempuan nelayan dan ;
- 2) *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap stakeholder terkait yang meliputi identifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat model pemberdayaan perempuan nelayan;

Untuk pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur (kuesioner), sementara untuk FGD dilaksanakan dengan pertanyaan semi terstruktur. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari pustaka yang ada, adalah data-data yang berbentuk laporan lembaga resmi, buku-buku, literatur, jurnal, media cetak, internet, dan hasil-hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

*Purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini umumnya digunakan karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika peneliti memutuskan teknik sampel ini, antara lain :

- 1) Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi;
- 2) Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjects*); dan
- 3) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

*Purposive sampling* dilakukan kepada para ahli bidang pemberdayaan perempuan nelayan yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan baik dalam wawancara maupun dalam kuesioner untuk membantu peneliti dalam mendeskripsikan dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong model pemberdayaan perempuan nelayan. *Purposive sampling* dilakukan kepada para narasumber dari SKPD yang terkait dengan pemberdayaan perempuan nelayan dan dilakukan kepada masyarakat dalam bentuk kuesioner untuk mengetahui faktor-

faktor pendorong dan penghambat model pemberdayaan perempuan nelayan.

### **E. Teknik Analisis Data.**

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan sebelum di lapangan, selama di lapangan saat pengumpulan data, dan setelah selesai pengumpulan data. Disamping itu juga dikumpulkan berbagai pendapat dari berbagai unsur yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan nelayan di Kabupaten Demak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Responden (Kelompok Wanita Puspita Bahari)**

Puspita Bahari adalah organisasi perempuan di Morodemak yang didirikan pada tanggal 25 Desember 2005 yang merupakan kelanjutan dari organisasi yang lama yaitu Mustika Bahari. Penggantian nama dilakukan saat pemilihan ketua baru agar ada warna dan semangat baru dalam kelompok Puspita Bahari. Adapun ketua kelompok Puspita Bahari adalah Masnu'ah. Dalam struktur organisasi, ketua dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris dan 1 (satu) orang bendahara. Fungsi sekretaris dan bendahara tidak jauh berbeda dari fungsi sekretaris dan bendahara pada organisasi lainnya. Saat ini jaringan kerja Kelompok Wanita Puspita Bahari antara lain dengan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH Semarang), Layan Nusantara, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) cabang Demak, LBH APIK (Aliansi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI). Berikut ini gambaran umum anggota kelompok Wanita Nelayan Puspita Bahari yang ada di Desa Morodemak Kabupaten Demak.

Tabel 4.1 Gambaran Umum Anggota Kelompok Wanita Nelayan Puspita Bahari

No.	Variabel	Minimum	Maksimum
1.	Usia	21	45
2.	Pendidikan	SD	SLTA
3.	Pengeluaran per bulan	1 juta	2 juta
4.	Lama menjadi anggota kelompok	Kurang dari 1 tahun	8 tahun

Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas, usia anggota kelompok Puspita Bahari 21 tahun sedangkan yang paling tua berumur 45 tahun. Sebagian besar anggota kelompok Puspita Bahari berusia antara 26 sampai dengan 35 tahun sebanyak 9 orang, sedangkan yang berusia kurang dari 25 tahun hanya sebanyak 5 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, hampir 50 % anggota kelompok Puspita bahari hanya tamatan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 10 orang, sedangkan yang berpendidikan SMP dan SLTA sebanyak 6 dan 4 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan perempuan di daerah pesisir masih rendah, karena pada umumnya orangtua yang memiliki anak perempuan rata-rata hanya menyekolahkan anaknya sampai lulus SD atau SLTP. Apabila dilihat dari besarnya pengeluaran setiap bulan, minimal kurang dari Rp 1 juta dan rata-rata pengeluarannya sebesar Rp 1 juta sampai dengan Rp 1,5 juta sedangkan yang paling besar adalah Rp1,6 juta sampai dengan Rp 2 juta. Rata-rata anggota Puspita Bahari telah bergabung selama lebih dari 1 tahun, sedangkan yang paling lama yaitu 8 tahun sebanyak 5 orang. Dan yang baru bergabung (kurang dari 1 tahun) sebanyak 2 orang. Jadwal pertemuan kelompok tidak rutin, karena kesibukan masing-masing anggota.

Pada awal pendiriannya, Puspita Bahari memiliki 30 anggota. Namun kini anggota yang aktif hanya 20 orang. Banyak anggota kelompok yang

mengundurkan diri karena sibuk mengurus rumah tangga dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Pada tahun 2007 mereka mencoba mendirikan Koperasi Simpan Pinjam yang melayani kebutuhan modal bagi anggotanya yang ingin melaut atau membutuhkan bahan baku untuk membuat kerupuk ikan, abon, sriding, udang krispi dan keripik ikan. Karena adanya kredit macet sebesar Rp 700.000, maka usaha simpan pinjam ini diganti dengan koperasi beras yang modal usahanya diperoleh dari sisa usaha simpan pinjam. Koperasi beras ini juga mendapat modalnya dari jimpitan (iuran dalam bentuk segenggam beras) dan iuran wajib Rp 2.000 per bulan dari para anggota koperasi. Besarnya pinjaman yang dapat disediakan oleh koperasi maksimal Rp 300.000 yang dapat dicicil selama 10 kali dengan ditambah bunga sebesar 2 %. Jadi apabila ada anggota yang meminjam Rp 100.000, maka cicilannya sebesar Rp 10.000 ditambah bunga Rp 500. Secara rata-rata, anggota koperasi meminjam Rp 100.000 sampai Rp 200.000 yang diangsur selama 10 kali.

Jika dilihat dari kegiatan ekonomi kelompok Puspita Bahari terdiri dari (1) aktivitas pra produksi yaitu ada koperasi sebagai penyedia modal (baik untuk belanja bahan baku maupun untuk bekal melaut para suami), (2) aktivitas produksi ikan tangkap yakni dengan menyediakan 3 perahu yang merupakan bantuan dari anggota jaringannya (Layar Nusantara,

KIARA, dan Dompot Dhuafa), dan (3) aktivitas pasca produksi yakni memproduksi olahan ikan laut (kerupuk ikan, ikan asin, abon ikan, dan lain-lain).

## B. Pembahasan

Perempuan masyarakat pesisir atau nelayan memiliki kedudukan dan partisipasi strategis dalam kegiatan ekonomi lokal dan memenuhi kebutuhan sosial ekonomi rumahtangganya. Kedudukan dan partisipasi demikian diperoleh karena karakteristik mata pencaharian dan kondisi sosial budaya yang membentuk sistem pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Dalam pembagian kerja ini, pekerjaan laki-laki adalah menangkap ikan dilaut. Sedangkan pekerjaan perempuan (istri nelayan) adalah kegiatan ekonomi pasca penangkapan. Jadi, jika laut dianggap sebagai ranah laki-laki maka darat adalah ranah perempuan. Pembagian peran gender yang patriarkis ini telah diajarkan sejak anak-anak.

Menurut Widodo *et. Al* (2011) ada beberapa model pemberdayaan perempuan nelayan yaitu: (1) model pengembangan kelompok, (2) pra pengembangan usaha, dan (3) pengembangan usaha. Berdasarkan hasil analisis data baik data sekunder maupun data primer, model pemberdayaan perempuan nelayan Puspita Bahari di Desa Morodemak adalah model pengembangan usaha yang merupakan tahap akhir dari model pemberdayaan masyarakat perempuan nelayan melalui penerapan teknologi tepat guna dan terpadu untuk pengolahan ikan pasca tangkap. Tahap ini dilakukan melalui pengembangan usaha kelompok perempuan nelayan dimana program pemberdayaan telah berorientasi pada pasar dan keuntungan. Hal ini disebabkan muara akhir dari kegiatan pengembangan usaha kelompok adalah *incoming generating* bagi anggota-anggotanya, maka kelompok usaha nelayan harus bersifat dinamis. Peran

pendamping adalah melakukan pengembangan jalur-jalur kerjasama terhadap aksesibilitas permodalan dan jalur-jalur pemasaran produk ikan olahan yang dapat diakses oleh kelompok-kelompok nelayan serta berorientasi pada pemecahan masalah pasar, aksesibilitas modal dan bahan baku, teknologi produksi, dan dalam pembuatan rencana usaha yang lebih baik. Kelompok perempuan nelayan disiapkan untuk dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman usaha kelompok, terutama yang bersumber dari lingkungan eksternal.

Terdapat beberapa faktor pendorong pemberdayaan perempuan nelayan pada kelompok Puspita Bahari yaitu adanya dukungan dari beberapa pihak terkait seperti adanya bantuan 3 (tiga) kapal dari Layar Nusantara, KIARA, dan Dompot Dhuafa untuk melaut bagi para suami mereka. Layar Nusantara dan KIARA merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang keadilan untuk nelayan. Sedangkan Dompot Dhuafa adalah organisasi nirlaba yang mengumpulkan dan membagikan zakat dan sedekah umat untuk bantuan dan program kerja. Selain itu, ada juga bantuan dari pihak pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Demak. Bantuan tersebut berupa alat-alat produksi dan pelatihan-pelatihan (pengolahan hasil ikan, *packaging*/pengemasan, *labeling*/pemberian label, dan lain-lain).

Ketua kelompok Puspita Bahari (Ibu Masnu'ah) juga aktif sebagai pendamping korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Morodemak. Ia mendampingi korban KDRT mulai dari proses pelaporan sampai dengan peradilan. Ibu Masnu'ah juga bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum APIK Semarang (LBH APIK) untuk mendampingi korban-korban KDRT. Beliau juga memperoleh beberapa

penghargaan sebagai Wanita Inspiratif dari Kick Andy (MetroTV), 100 Wanita Hebat dari Asean Coral Woman, dan diangkat sebagai koordinator Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) di Jawa Tengah. Disamping faktor-faktor pendorong tersebut, ada juga faktor-faktor penghambat pemberdayaan perempuan nelayan khususnya kelompok wanita nelayan Puspita Bahari.

Ada beberapa faktor yang menghambat pemberdayaan perempuan nelayan dalam kelompok Puspita Bahari yang dapat dibagi menjadi 2 yaitu hambatan dalam menjalankan organisasi dan dalam mengelola ekonomi. Terkait dengan hambatan dalam menjalankan organisasi yaitu hambatan budaya materialistik, budaya patriarki, dan budaya inferioritas. Hambatan budaya materialistik yaitu dalam bentuk keengganan masyarakat sekitar terutama ibu-ibu untuk bergabung dalam kelompok wanita nelayan (Puspita Bahari) dikarenakan mereka berpikir bahwa dengan bergabung dalam kelompok Puspita Bahari tidak akan mendapatkan keuntungan apapun bahkan waktu mereka untuk mencari nafkah dan mengurus keluarga menjadi berkurang. Hal tersebut terjadi diduga karena kemiskinan yang ada di Desa Morodemak sehingga masyarakat Morodemak menganggap mencari keuntungan materi sebagai keutamaan. Oleh karena pola pikir tersebut menyebabkan Puspita Bahari sulit menambah anggota baru.

Hambatan dalam menjalankan organisasi yang kedua adalah adanya budaya patriarki yang menghambat para perempuan untuk ikut dan aktif dalam berorganisasi. Budaya patriarki ini mewajibkan para perempuan di Desa Morodemak mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga dan membantu suami dalam mengurus kebutuhan sehari-hari. Bahkan pada tahun 2005, banyak anggota Puspita Bahari yang

mengundurkan diri karena dilarang oleh suami maupun karena tidak ada yang merawat anak ketika suami sedang pergi melaut. Pada awalnya anggota Puspita Bahari sebanyak 30 orang, namun karena ada larangan tersebut menyebabkan 20 anggota mengundurkan diri sehingga yang tersisa hanya 10 orang. Namun berkat kerja keras beberapa anggota lainnya yang masih aktif, pada tahun 2013 ini anggota Puspita Bahari sudah bertambah menjadi 20 orang.

Hambatan yang terakhir dalam menjalankan organisasi adalah budaya inferioritas yaitu rendah diri atau tidak percaya pada kemampuan diri sendiri. Diduga budaya ini muncul akibat rendahnya tingkat pendidikan mereka dan para anggota Puspita Bahari. Rata-rata tingkat pendidikan perempuan anggota Puspita Bahari adalah Sekolah Dasar (SD) dan SMP/MTs sehingga mereka tidak berani menempati posisi-posisi strategis dalam struktur organisasi Puspita Bahari. Akibatnya, regenerasi dalam struktur organisasi menjadi terhambat.

Hambatan dalam mengelola kegiatan ekonomi kelompok Puspita Bahari adalah sarana prasarana produksi masih terbatas (mesin, alat perajang, kompor, *freezer*/pendingin, dan peralatan masak serta belum adanya tempat produksi), pemasaran produk, dan mahalnya bahan baku produksi serta hasil tangkapan nelayan yang tidak pasti menyebabkan stok bahan baku yang cenderung tidak stabil. Sehingga apabila ada pesanan dalam jumlah yang relatif banyak, mereka tidak dapat memenuhi pesanan tersebut yang berarti tidak ada penambahan jumlah konsumen.

Hambatan dalam proses produksi yang sangat dirasakan oleh para anggota Puspita Bahari adalah tidak adanya tempat produksi (baik dari tahap persiapan produksi sampai dengan pengemasan dan pelabelan produk) serta terbatasnya alat-

alat produksi (timbangan, *freezer*, alat perajang, kompor, alat pembuat kemasan produk). Pada tahun 2007 sudah ada bantuan pendirian rumah produksi dari LPBPN (salah satu lembaga pendamping perempuan nelayan) namun terpaksa ditutup pada tahun 2011 karena adanya rob. Direncanakan pada tahun 2013 ini, kelompok Puspita Bahari akan membangun Rumah Produksi di pinggir sungai agar proses produksi dapat terus berjalan dan tidak berpindah-pindah tempat.

Terkait dengan alat-alat produksi, pada tahun 2012 Kelompok Puspita Bahari memperoleh bantuan alat produksi berupa mesin perajang kerupuk, blender, kompor, dan tepung pati dari Gubernur Jawa Tengah dengan nilai sebesar Rp 15 juta. Tidak hanya itu, Balitbang Prov. Jateng juga memberikan bantuan alat pembuat tepung ikan kepada kelompok tersebut pada tahun 2012. Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memberikan bantuan lemari pendingin/kulkas dan *mixer* sebanyak 1 (satu) unit, sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak juga memberikan bantuan berupa pelatihan-pelatihan baik pelatihan pra produksi, produksi maupun pasca produksi yang diadakan rutin setiap tahun. Untuk mengatasi permasalahan pemasaran produk, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah juga memberikan bantuan motor TOSA untuk memasarkan produk Puspita Bahari sampai keluar daerah Kabupaten Demak.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil analisis, model pemberdayaan perempuan nelayan Puspita Bahari di Desa Morodemak adalah model pengembangan usaha yang merupakan tahap akhir dari model

pemberdayaan masyarakat perempuan nelayan melalui penerapan teknologi tepat guna dan terpadu.

2. Faktor-faktor pendorong model pemberdayaan perempuan nelayan pada Kelompok Puspita Bahari yaitu adanya dukungan berbagai pihak baik swasta, pemerintah, maupun dari masyarakat.
3. Ada beberapa faktor yang menghambat pemberdayaan perempuan nelayan dalam kelompok Puspita Bahari yang dapat dibagi menjadi 2 yaitu hambatan dalam menjalankan organisasi (hambatan budaya materialistis, budaya patriarki, dan budaya inferioritas) dan dalam mengelola ekonomi (sarana prasarana produksi masih terbatas (mesin, alat perajang, kompor, *freezer*, dan peralatan masak serta belum adanya tempat produksi), pemasaran produk, dan mahalannya bahan baku produksi serta hasil tangkapan nelayan yang tidak pasti menyebabkan stok bahan baku yang cenderung tidak stabil.

### **B. Rekomendasi**

1. Perlunya pendampingan dan peningkatan motivasi bagi perempuan-perempuan nelayan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam organisasi dalam rangka pemberdayaan perempuan nelayan di Desa Morodemak.
2. Perlunya peningkatan pengetahuan perempuan nelayan melalui pelatihan baik mengenai pengolahan pra produksi, proses produksi serta pasca produksi agar kualitas produk yang dihasilkan semakin bagus dan dapat menjangkau pangsa pasar yang lebih luas lagi.
3. Selain pelatihan, kelompok perempuan nelayan juga memerlukan tambahan modal dan juga sarana prasarana produksi yang memadai agar kegiatan produksi dapat terus berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arbaiyah. 2011. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir Pantai (Studi pada Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- BPS Kabupaten Demak. 2012. *Demak Dalam Angka Tahun 2012*. Demak: BPS Kabupaten Demak bekerjasama dengan BAPPEDA Kab. Demak
- \_\_\_\_\_. 2012. *Kecamatan Bonang Dalam Angka Tahun 2012*. Demak: BPS Kabupaten Demak bekerjasama dengan BAPPEDA Kab. Demak
- Bengen, D.G. 2009. *Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Dyah P, Sulistyani. 2005. *Analisis Efisiensi TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelas 1, 2, dan 3 di Jawa Tengah dan Pengembangannya Untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan*. Semarang: Program Studi Magister Sutdi Manajemen Sumberdaya Pantai Universitas Diponegoro. Tesis
- Hikmat, A. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012. *Statistik Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2011*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kusnadi. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara
- Kusnadi, Sumarjono, Sulistiowati, Yunita, Subchan, Puji. 2007. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Mcardle, J. 1989. Community Development Tools of Trade. *Community Quarterly Journal* 16: page 47-54.
- Nasution, A Badaruddin. 2005. *Isu-Isu Kelautan dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Z, Sastrawidjaja, Hartono, Mursidin, Priyatna. 2007. *Sosial Budaya Masyarakat Nelayan, Konsep dan Indikator Pemberdayaan*. Jakarta: Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Nikijuluw, PHV. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan: P3R*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Kajian Strategis Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.